

LAPORAN

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN III TAHUN 2024



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN AMBON**

Jln. Ir. M. Putuhena, Wailela – Rumah Tiga, Kec. Teluk Ambon, 97234
Tlp. (0911) 351783, Fax. (0911) 351781,
Laman : www.kkp.go.id/djpsdkp/stasiunambon
Email : psdkp.ambon@kkp.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas terselesainya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang merupakan bentuk pertanggung jawaban dan tolak ukur tingkat pencapaian sasaran atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan ini memuat hasil Survei Kepuasan Masyarakat mengenai pelayanan publik dalam penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) dan Lembar Verifikasi Hasil

Pendaratan Ikan (LVHPI). Atas dasar meningkatkan kualitas pelayanan, maka unit pelayanan publik pada UPT Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon sebagai penyelenggara pelayanan publik melakukan Survei Kepuasan Masyarakat selama bulan Juli sampai dengan September 2024. Hasil dari survei diharapkan memberikan gambaran tentang capaian kinerja dan permasalahan yang terjadi dalam pelayanan publik lingkup Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan tanggung jawab penyelenggaraan negara, laporan ini sangat terbuka terhadap saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan dan perwujudan akuntabilitas publik.

Ambon, 9 Oktober 2024

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan Ambon



Martin Yernias Luhulima, S.H., M.Si
NIP. 19750317 200212 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
BAB II PENGUMPULAN DATA SKM	
2.1. Pelaksanaan SKM	4
2.2. Metode Pengumpulan Data	4
2.3. Lokasi Pengumpulan Data	4
2.4. Waktu Pelaksanaan SKM	4
2.5. Penentuan Jumlah Responden	5
BAB III HASIL PENGOLAHAN DATA SKM	
3.1 Jumlah Responden SKM	6
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat	8
BAB IV ANALISIS HASIL SKM	
4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan	10
4.2 Rencana Tindak Lanjut	13
4.3 Tren Nilai SKM	14
BAB V HASIL TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA	
BAB VI KESIMPULAN	
LAMPIRAN	
1. Kuesioner	23
2. Hasil Pengolahan Data	24
3. Dokumentasi Hasil Tindak Lanjut SKM Periode Sebelumnya	27

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Responden Layanan SLO	6
Tabel 2. Jumlah Layanan LVHPI	7
Tabel 3. Nilai dari Jumlah Nilai Rata-Rata Setiap Unsur Pelayanan	8
Tabel 4. Saran dan MASukan dari Pengguna Layanan	13
Tabel 5. Penilaian Unsur Prioritas	14
Tabel 6. Matriks Rencana Tindak Lanjut	14
Tabel 7. Ringkasan Hasil SKM Triwulan II Tahun 2024	17
Tabel 8. Rekomendasi SKM Triwulan II tahun 2024	17
Tabel 9. Tabel Realisasi Atas Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM	18



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Grafik Nilai Rata-Rata dari 9 (Sembilan) Unsur kategori Pelayanan ..	6
Grafik 2. Indeks Kepuasan Masyarakat	7
Grafik 3. Nilai dari Jumlah Nilai Rata-Rata Setiap Unsur Pelayanan	8
Grafik 4. Tren Nilai SKM	14



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner SKM	23
Lampiran 2. Hasil Pengolahan Data SKM TW III Tahun 2024	24
Lampiran 3. Dokumentasi Hasil Tindak Lanjut SKM Periode Sebelumnya	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan setiap warga Negara, atas barang, jasa atau pelayanan administratif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Pemberian pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat diharapkan dapat di terima dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Saat ini pemerintah terus mendorong proses digitalisasi layanan serta bagaimana mencapai keterhubungan sehingga dapat tercipta keterpaduan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, karena dalam penerapannya masih dibutuhkan penyesuaian di berbagai sektor. Semua penyesuaian ini dilaksanakan dengan tujuan terwujudnya pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi. Peran masyarakat atau stakeholder dalam mewujudkan proses digitalisasi layanan ini harusnya sudah dapat dimulai dari penetapan standar pelayanan, forum konsultasi publik, survei kepuasan masyarakat, inovasi pelayanan publik, integrasi pelayanan, pengaduan hingga evaluasi pelayanan publik

Peran masyarakat dalam mewujudkan proses digitalisasi layanan ini, dapat dilaksanakan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), SKM sendiri adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh data hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Mengingat jenis pelayanan sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka untuk memudahkan penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) unit pelayanan memerlukan pedoman umum yang digunakan sebagai acuan untuk mengetahui kinerja pelayanan publik di lingkungan instansi masing-masing. Dari



hasil survei inilah bisa ditentukan arah inovasi yang mendukung proses digitalisasi layanan yang merupakan salah satu target yang harus dicapai pada Unit Pelayanan Publik Pemerintah.

Pelaksanaan Evaluasi kinerja pelayanan publik Pemerintah telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Mengacu pada hal tersebut, maka Tim Survei dan Pengolah Data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Stasiun PSDKP Ambon telah melakukan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pada unit pelayanan Penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik.
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2017 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118 tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah.
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari kegiatan Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat adalah mengetahui dan mempelajari kinerja pelayanan dalam penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) sehingga memperoleh gambaran untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan, selain itu untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1. Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat

Pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat pada unit pelayanan penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) lingkup Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon adalah petugas pelayanan yang terdiri dari Pengawas Perikanan dan Petugas Pelayanan di seluruh unit pelayanan lingkup wilayah kerja Stasiun PSDKP Ambon, yang dikoordinir oleh Koordinator Pelayanan dan Koordinator Satuan Pengawasan.

2.2. Metode Pengumpulan Data

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan dengan kuisioner sebagai alat bantu pengumpulan data melalui Aplikasi SUSAN KKP yang merupakan pusat pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat pada KKP. Kuisioner disusun berdasarkan tujuan survei terhadap tingkat kepuasan masyarakat, yang terdiri dari, jenis layanan, data responden dan mutu pelayanan publik yang merupakan pendapat penerima pelayanan (masyarakat), atas pelayanan yang diberikan petugas. Jawaban yang diberikan merupakan setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan, yaitu dari yang sangat sesuai sampai dengan tidak sesuai. Untuk kategori tidak sesuai diberi nilai persepsi 1, kurang sesuai diberi nilai persepsi 2, sesuai diberi nilai persepsi 3, sangat sesuai diberi nilai persepsi 4.

2.3. Lokasi Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan di lokasi pelayanan SLO dan LVHPI di Stasiun PSDKP Ambon di Ambon, Satwas Ternate di Ternate, Satwas Morotai di Tobelo, Satwas Halmahera Selatan di Bacan dan Satwas Seram Bagian Timur di Banda, Masohi dan Bula.

2.4. Waktu Pelaksanaan SKM

Pengumpulan data dilakukan di Triwulan III pada bulan Juli sampai dengan bulan Spetember tahun 2024.

2.5. Penentuan Jumlah Responden

Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Populasi dapat dilihat dari periode sebelumnya. sebagai contoh untuk pelaksanaan survei per semester: menentukan jumlah responden minimal pada semester ke 2 dapat mengacu jumlah populasi disemester ke 1. Kriteria untuk responden Survei Kepuasan Masyarakat adalah para pengguna layanan pada unit pelayanan penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) dan layanan LVHPI. Pemanfaat layanan didefinisikan sebagai orang yang sedang atau pernah (paling lama dua bulan terakhir) mendapat pelayanan pada unit pelayanan.

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

3.1. Jumlah Responden SKM

Data hasil penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada triwulan III dari unit pelayanan dengan data kuisioner yang tersebar di Stasiun PSDKP Ambon, Satwas Ternate, Satwas Halmahera Selatan, Satwas Morotai dan Satwas SBT dengan Jumlah total 119 responden yang merupakan responden SLO dan LVHVI dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Responden Layanan SLO

No.	Karakteristik	Indikator	Jumlah	Porsentase
1.	Jenis Kelamin	Laki-laki	102	94%
		Perempuan	7	6%
2.	Pendidikan	SD	20	18%
		SLTP	15	14%
		SLTA	60	55%
		D3	2	2%
		S1	12	11%
3.	Pekerjaan	Swasta	15	14%
		Wirausaha	47	43%
		PNS	2	2%
		PUKKP	45	41%
4.	Jenis Layanan	Standar Laik Operasi	109	100%

Tabel 2. Jumlah Responden Layanan LVHPI

No.	Karakteristik	Indikator	Jumlah	Porsentase
1.	Jenis Kelamin	Laki-laki	0	0%
		Perempuan	10	100%
2.	Pendidikan	SD	0	0%
		SLTP	0	0%
		SLTA	2	20%
		D3	0	0%
		S1	8	80%
3.	Pekerjaan	Swasta	9	90%
		Wirausaha	0	0%
		PUKKP	1	10%
4.	Jenis Layanan	LVHPI	10	100%

Dari kedua tabel di atas menunjukkan jumlah responden layanan SLO sejumlah 109 responden dan LVHPI sebanyak 10 responden yang dihitung berdasarkan :

1. Jenis Kelamin
2. Kualifikasi Pendidikan
3. Pekerjaan
4. Jenis Layanan

Jumlah responden layanan SLO jika dihitung berdasarkan jenis kelamin, jumlah responden laki-laki sebanyak 102 responden atau setara 94% sedangkan untuk perempuan sebanyak 7 responden atau setara 6%. Dihitung berdasarkan kualifikasi pendidikan jumlah responden layanan SLO untuk tingkat pendidikan SD sebanyak 20 responden, setara SLTP sebanyak 15 responden, setara SLTA sebanyak 60 responden, setara D3 sebanyak 2 responden dan setara S1 sebanyak 12 responden. Dihitung berdasarkan kualifikasi jenis pekerjaan, sebanyak 15 responden dari Swasta, Wiraswasta sebanyak 47 responden, PNS 2 responden dan PUKKP sebanyak 45 responden, total responden untuk jenis layanan SLO sebanyak 109 responden.

Berbeda dengan layanan SLO, jumlah responden layanan LVHPI jika dihitung berdasarkan jenis kelamin, jumlah responden Laki-laki tidak ada atau setara 0%

sedangkan untuk perempuan sebanyak 10 responden atau setara 100%. Dihitung berdasarkan kualifikasi Pendidikan jumlah responden layanan LVHPI untuk tingkat pendidikan didominasi oleh setara S1 yaitu sejumlah 8 orang dan setara SLTA sebanyak 2 responden. Dihitung berdasarkan kualifikasi jenis pekerjaan untuk Swasta terdapat 9 responden, dan PUKKP sebanyak 1 responden, total responden untuk jenis layanan LVHPI sebanyak 10 responden.

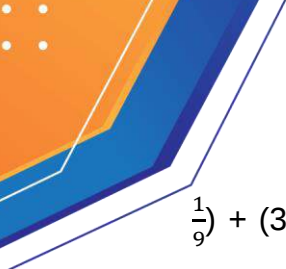
3.2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor: 14 Tahun 2017 tentang penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat, maka Stasiun PSDKP Ambon melakukan penilaian terhadap unsur yang wajib dinerikan penilaian yang memuat 9 (sembilan) unsur pelayanan, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Adapun nilai survei komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu $\frac{1}{9}$ Hasil nilai rata-rata unsur dan masing-masing unit pelayanan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. Nilai dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata
1	Persyaratan	3,84
2	Prosedur	3,77
3	Waktu	3,69
4	Biaya/Tarif	3,59
5	Kesesuaian produk	3,73
6	Kesigapan petugas	3,71
7	Perilaku /kemampuan petugas	3,77
8	Ketersediaan sarana dan prasarana	3,69
9	Layanan konsultasi dan pengaduan	3,66

Maka untuk mengetahui nilai survei unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut: $(3,84 \times \frac{1}{9}) + (3,77 \times \frac{1}{9}) + (3,69 \times \frac{1}{9}) + (3,59 \times \frac{1}{9}) + (3,73 \times \frac{1}{9}) + (3,71 \times \frac{1}{9}) + (3,77 \times \frac{1}{9}) + (3,69 \times \frac{1}{9}) + (3,66 \times \frac{1}{9})$



$\frac{1}{9}) + (3,69 \times \frac{1}{9}) + (3,66 \times \frac{1}{9}) =$ Nilai survei adalah 3,72 Nilai SKM setelah dikonversi untuk pelayanan SLO dan LVHPI sebesar 92,95 dengan mutu pelayanan Sangat Baik.

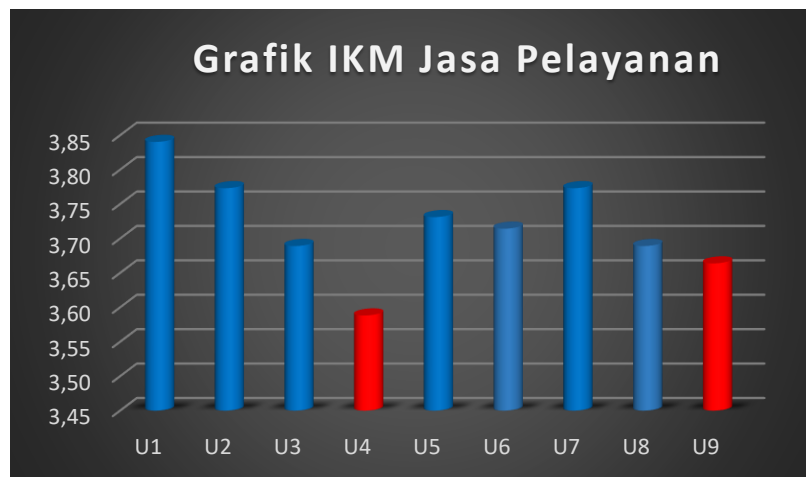
BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

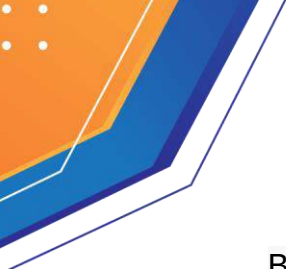
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang merupakan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan SLO pada unit pelayanan Stasiun PSDKP Ambon, menggambarkan kinerja unit pelayanan SLO Sangat Baik berdasarkan IKM 3,72, dari rata2 range nilai pada angka 3 dan 4, dengan rincian perunsur pelayanan kategori SLO dsan LVHPI yang dapat kami sampaikan dalam bentuk grafik dari hasil penilaian SKM ini.

Grafik 1. Grafik Nilai Rata-Rata dari 9 (sembilan) Unsur kategori pelayanan SLO dan LVHPI



Grafik 2. Grafik Indeks Kepuasan Masyarakat





Berdasarkan skala penilaian yang diperoleh, maka dapat diuraikan penjelasan setiap unsurnya sebagai berikut:

a. Persyaratan

Persyaratan yang diperlukan untuk menggunakan layanan atau produk tersebut telah memenuhi harapan atau standar yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari grafik diatas yang menggambarkan kejelasan persyaratan, kelengkapan dokumen yang diperlukan, dan proses yang mudah diikuti oleh pengguna layanan sehingga unsur persyaratan rettingnya lebih tinggi disbanding unsur yang lain.

b. Prosedur

Penilaian prosedur menunjukkan bahwa prosedur yang terkait dengan layanan atau produk tersebut telah memenuhi harapan atau standar yang ditetapkan, meskipun demikian masih ada sedikit ruang untuk perbaikan. Misalnya, prosedur tersebut mungkin perlu lebih disederhanakan, lebih terstruktur, atau lebih mudah dipahami oleh pengguna.

c. Waktu

Penilaian waktu menunjukkan bahwa layanan atau produk tersebut diberikan dalam waktu yang memadai. Namun, terdapat potensi untuk meningkatkan efisiensi atau kecepatan dalam memberikan layanan atau produk tersebut dikarenakan pelayanan secara online terkadang terkendala jaringan internet sehingga membutuhkan waktu dalam pemrosesannya. Kelemahan yang timbul akibat hal ini dapat mencakup, peningkatan kecepatan respons, atau peningkatan penerbitan produk tepat waktu.

d. Biaya/Tarif

Penilaian biaya atau tarif menunjukkan bahwa biaya yang dikenakan untuk layanan atau produk tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun kelemahan disini menunjukkan ada potensi kurangnya ketelitian atau tingkat pengetahuan pengguna layanan dalam mengisi pertanyaan yang ada pada Unsur Biaya sehingga pada unsur biaya memperoleh nilai paling rendah dari sembilan unsur yang ada.

e. Kesesuaian produk

Penilaian kesesuaian produk menunjukkan bahwa produk atau layanan tersebut sesuai dengan kebutuhan atau harapan pengguna. Namun ada potensi peningkatan kemudahan dalam mengakses sehingga mempermudah pengguna layanan dalam mengakses layanan.

f. Kesiapan petugas

Penilaian kesiapan petugas menunjukkan bahwa petugas yang terlibat dalam layanan atau produk tersebut merespons dengan cukup cepat apa yang menjadi kendala yang dialami oleh pengguna layanan. Namun, masih ada potensi untuk meningkatkan kecepatan atau ketepatan respons petugas dalam menanggapi permintaan atau masalah pengguna seperti penambahan Pengawas Perikanan di lapangan.

g. Perilaku/kemampuan petugas

Penilaian perilaku dan kemampuan petugas menunjukkan bahwa petugas memenuhi harapan atau standar yang ditetapkan. Meskipun demikian, masih ada ruang untuk peningkatan dalam hal ini, peningkatan keahlian atau keterampilan petugas, serta peningkatan interaksi yang ramah dan profesional dengan pengguna layanan.

h. Ketersediaan sarana dan prasarana

Penilaian ketersediaan sarana dan prasarana menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang diperlukan untuk layanan atau produk tersebut memadai. Namun, ada potensi untuk perbaikan atau peningkatan, seperti peningkatan ketersediaan sarana prasarana serta kualitas peralatan atau fasilitas yang digunakan dalam penyediaan layanan tersebut, serta layanan internet yang stabil..

i. Layanan konsultasi dan pengaduan

Penilaian layanan konsultasi dan pengaduan menunjukkan bahwa layanan ini memenuhi harapan atau standar yang ditetapkan. Namun, ada potensi untuk peningkatan dan perbaikan, seperti peningkatan responsivitas, kejelasan informasi yang diberikan, atau peningkatan proses penanganan pengaduan.

Dengan memperhatikan area-area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, unit pelayanan public dapat menentukan tindakan yang tepat untuk meningkatkan

pengalaman pengguna, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kepuasan secara keseluruhan.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisis data survey kepuasan masyarakat triwulan III tahun 2024 di unit pelayanan publik lingkup Stasiun PSDKP Ambon, menemukan adanya unsur-unsur pelayanan yang rendah, dan memiliki peluang untuk ditingkatkan. Selain itu juga untuk memperbaiki dan meningkatkan kegiatan pelayanan publik secara keseluruhan, perlu adanya perhatian dan respon atas masukan dan harapan dari pengguna layanan, maka berdasarkan hasil penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, terdapat beberapa unsur yang masih bisa ditingkatkan. Unsur-unsur tersebut yaitu Kesigapan Petugas dan Sarana dan Prasarana, dari kedua unsur tersebut, terdapat masukan dari pengguna jasa yang diperoleh dari hasil survey. Masukan tersebut yaitu pada area sarana prasarana, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4. Saran dan Masukan dari Pengguna Jasa

id_survei	Nama_Layanan	Kritik_Saran	Tgl_Data_SKM
79077	Standar Laik Operasi	Semua baik terkecuali jaringan	07/08/2024 09:17:05
79366	Standar Laik Operasi	Harus memperkuat jaringan internet	09/08/2024 13:02:41
79113	Standar Laik Operasi	Penambahan waktu pelayanan	07/08/2024 10:30:46
79082	Standar Laik Operasi	Harus tepat waktu	07/08/2024 09:44:47

Dari beberapa hasil analisis data dan masukan dari pengguna layanan diatas, maka dapat dibuat matriks penilaian unsur prioritas yang akan ditindak lanjuti,

untuk meningkatkan kepuasan masyarakat atas kegiatan pelayanan public di Stasiun PSDKP Ambon:

Tabel 5. Penilaian Unsur Prioritas

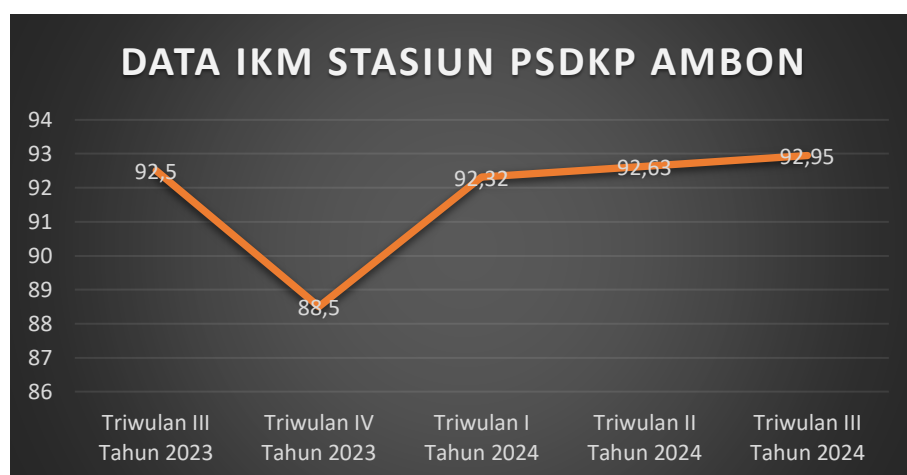
Jumlah responden 109 Orang	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM Per Unsur	3,84	3,77	3,69	3,59	3,73	3,71	3,77	3,69	3,66
Mutu Kinerja	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan			Prioritas 2					Prioritas 1	
IKM Total	92,95 (Sangat Baik)								

Sedangkan untuk matrik rencana tindak lanjut evaluasi hasil SKM triwulan III tahun 2024 pada unit pelayanan Stasiun PSDKP Ambon adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Matriks Rencana Tindak Lanjut

No	Prioritas Unsur	Program/ Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	U8 Sarana Prasarana	Memperkuat Jaringan Internet pada ruang layanan.				√	Bidang Sarpras Unit Pelayanan
2	U3 Waktu Pelayanan	Pelayanan SLO Tepat Waktu			√		Unit Pelayanan

4.3 Tren Nilai SKM

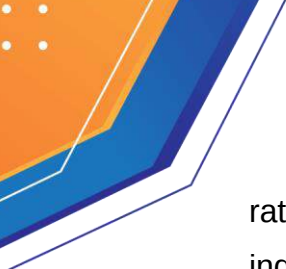




Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2024 berdasarkan data diatas mengalami fluktuasi, hal ini dapat dilihat dari grafik diatas bahwa data SKM triwulan III tahun 2023 hingga triwulan III tahun 2024. Pada triwulan III tahun 2023, Nilai rata-rata IKM mencapai 92,50 dengan IKM Minimum pada periode ini mencapai 91,25, sedangkan nilai IKM Maksimum adalah 95,00. Berbeda dengan data kepuasan masyarakat pada triwulan sebelumnya, triwulan IV mengalami penurunan dengan nilai terendah di tahun 2023. Nilai rata-rata IKM triwulan IV tahun 2023 hanya 88,50 dengan nilai minimum 86,86 dan maximum 91,67 namun pada triwulan I tahun 2024, nilai rata-rata IKM mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 92,32 dengan IKM Minimum adalah 89,84 sedangkan nilai IKM Maksimum adalah 95,70. Di Triwulan II Nilai IKM mengalami Peningkatan yang cukup dibanding di Triwulan I tahun 2024 yakni diangka 92,63 dengan IKM Minimum adalah 91,35 sedangkan nilai IKM Maksimum adalah 94,87. Sementara pada triwulan I tahun 2024 nilai IKM mencapai angka 92,95. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan sehingga menunjukkan adanya tren yang sangat positif terhadap pelayanan public yang diberikan.

Selain itu, NRR IKM (Net Rating Ratio) juga perlu diperhatikan. NRR IKM merupakan perbandingan antara rata-rata IKM dengan nilai IKM Minimum. nilai NRR IKM pada triwulan III tahun 2023 mencapai 3,70, sementara pada triwulan IV tahun 2023 nilai NRR IKM yang terendah yaitu 3,54 namun pada triwulan I nilai NRR IKM tahun 2024 meningkat yaitu mencapai 3,69, begitupun juga pada triwulan II tahun 2024 NRR IKM (Net Rating Ratio) mengalami peningkatan yaitu di angka 3,71. Di Triwulan III tahun 2024 NRR IKM (Net Rating Ratio) mengalami peningkatan yaitu di angka 3,7 Hal ini menunjukkan tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan yang diberikan sangat baik dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Secara keseluruhan, data menunjukkan tren yang positif dalam kepuasan masyarakat terhadap Unit Pelayanan Publik di lingkup Stasiun PSDKP Ambon pada triwulan III, IV tahun 2023 serta pada TW I, II dan III tahun 2024. Meskipun terjadi fluktuasi tingkat kepuasan masyarakat, tingkat kepuasan tetap tinggi dan



rata-rata IKM mencerminkan tingkat kepuasan yang baik. Hal ini dapat menjadi indikator bahwa Unit Pelayanan Publik Stasiun PSDKP Ambon telah memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat, meskipun tetap perlu dilakukan evaluasi dan tindakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar dapat mempertahankan atau meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan.

BAB V

TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA

1. Tabel 7. ringkasan hasil SKM triwulan II Tahun 2024

Nilai dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan SLO

Jumlah responden 78 Orang	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM Per Unsur	3,79	3,74	3,72	3,69	3,68	3,65	3,72	3,65	3,69
Mutu Kinerja	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan						Prioritas 2		Prioritas 1	
IKM Total	92,63 (Sangat Baik)								

2. Rekomendasi SKM triwulan sebelumnya

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dapat menunjukan titik lemah atau area-area pelayanan yang perlu mendapatkan perhatian yaitu kesiapan petugas dan , ketersediaan sarana dan prasarana, maka rekomendasi yang dapat disampaikan, yaitu; Penyediaan sarana prsarana berupa laptop dan perbaikan pendingin ruangan.

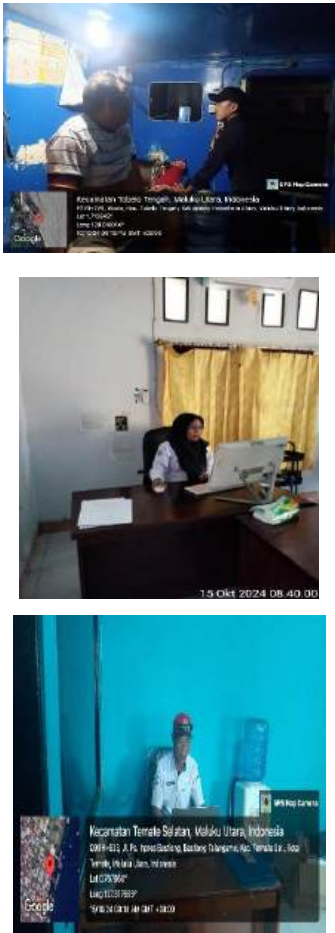
Tabel 8. Rekomendasi SKM Triwulan II tahun 2024

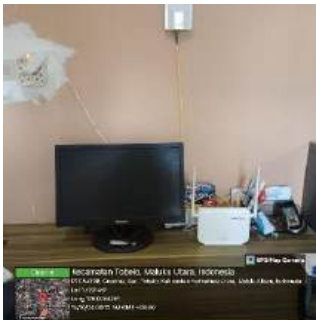
No	Prioritas Unsur	Program/ Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	U6 Kesiapan Petugas	Penambahan petugas di lapangan.			√		Unit Pelayanan
2	U8 Sarana Prasarana	Penyediaan fasilitas seperti Air minum, serta peningkatan koneksi internet yang baik dan stabil.			√		Bidang Sarpras

3. Tindak Lanjut Rekomendasi SKM Triwulan Sebelumnya

Pemberian laptop dan Perbaikan pendingin ruangan demi kenyamanan peserta layanan.

4. Tabel Realisasi Atas Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM

No	Rencana Tindak Lanjut	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan)	Dokumentasi Kegiatan	Tantangan/Hambatan
1	Penambahan petugas di lapangan.	Stasiun PSDKP Ambon telah melakukan penambahan petugas layanan yang di tindaklanjuti dengan Surat tugas sebagaimana terlampir		
2	Penyediaan fasilitas seperti Air minum di ruang layanan	Stasiun PSDKP Ambon menyediakan Air minum di ruang-ruang layanan baik di Stasiun maupun di Stawas		

			  	
3	peningkatan koneksi internet yang baik dan stabil.	Telah dilaksanakan perbaikan koneksi Internet di ruang layanan di Satwas tobelo	 	

BAB VI

KESIMPULAN

Berdasarkan data survey kepuasan masyarakat triwulan III tahun 2024 di unit pelayanan lingkup Stasiun PSDKP Ambon, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Terdapat tren positif dalam kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Unit Pelayanan Stasiun PSDKP Ambon dibanding pada triwulan II tahun 2024. Dalam periode tersebut, rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berada pada tingkat Sangat baik, dengan nilai IKM di atas 92,95. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan dan menunjukkan keberhasilan Unit Pelayanan Publik Stasiun PSDKP Ambon dalam mempertahankan kualitas layanan yang baik.
2. Variasi dalam tingkat kepuasan terlihat dari nilai IKM Minimum dan Maksimum, yang mengindikasikan adanya perbedaan antara pelayanan terendah dan tertinggi yang diberikan oleh Unit Pelayanan. Dengan Net Rating Ratio (NRR IKM) yang tinggi menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat merasa puas dengan layanan yang diberikan.
3. Untuk unsur layanan terendah merupakan prioritas perbaikan yaitu sarana prasarana dan ketepatan waktu dalam melakukan pelayanan yang diberikan terhadap responden di periode selanjutnya.

Meskipun keberhasilan pada triwulan ke III cukup baik, unit pelayanan Stasiun PSDKP Ambon tetap menyadari pentingnya evaluasi dan tindakan perbaikan yang berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan kepuasan masyarakat di masa depan



LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner SKM

Survey Kepuasan Masyarakat

Unit : Stasiun PSDKP Ambon

Data Layanan

Pilih Layanan

☐ Surat Lark Operasi
☐ Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan

Data Responden

Waktu Survey

11-Oct-2024 06:52

Nama

Jenis Usaha

☐ Perseorangan
☐ Korporasi

Jenis Kelamin/Gender

☐ Pria/Laki-laki
☐ Wanita/Perempuan

Usia

☐ < 25 Tahun
☐ 25 s/d 45 Tahun
☐ 46 s/d 60 Tahun
☐ > 60 Tahun

Pendidikan

☐ SD
☐ SMP
☐ SMA
☐ D3

☐ S1
☐ S2
☐ S3

Pekerjaan

☐ ASN
☐ TNI/POLRI
☐ Pelaku Usaha KHP
☐ Pegawai Swasta
☐ Wirausaha Non KKP
☐ Pelajar / Mahasiswa

Pertanyaan

1. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu tentang **kesesuaian penyertaan** pelayanan yang harus dipenuhi dengan penyertaan pelayanan yang diinformasikan?

☐ Sangat sesuai
☐ Sesuai
☐ Kurang sesuai
☐ Tidak sesuai

2. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **kemudahan prosedur** yang dijalani untuk mendapatkan layanan?

☐ Sangat Mudah
☐ Mudah
☐ Kurang mudah
☐ Tidak mudah

3. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **kesesuaian jangka waktu penyelesaian** pelayanan dengan yang diinformasikan?

☐ Sangat sesuai
☐ Sesuai
☐ Kurang sesuai
☐ Tidak sesuai

4. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **kesesuaian biaya** pelayanan yang dibayarkan dengan yang diinformasikan?
(pelebaran penilaian DLO tidak kelaya atau gratis)

☐ Sangat sesuai
☐ Sesuai
☐ Kurang sesuai
☐ Tidak sesuai

5. Bagaimana pendapat Saudara tentang **kesesuaian produk** pelayanan antara yang ada pada publikasi dengan pelayanan yang diberikan?

☐ Sangat sesuai
☐ Sesuai
☐ Kurang sesuai
☐ Tidak sesuai

[illegible]

80	4	3	4	4	4	3	3	3	3
81	3	3	3	3	3	3	3	3	2
82	4	4	3	4	4	4	4	3	3
83	4	4	3	3	4	4	4	3	4
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4
87	4	4	4	4	4	4	4	4	4
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4
89	4	4	3	3	3	3	3	3	3
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4
93	4	4	4	4	4	4	4	4	4
94	3	3	2	4	3	3	3	3	3
95	4	3	3	3	3	3	3	3	3
96	3	3	3	3	4	3	3	3	3
97	4	4	4	4	4	4	4	4	4
98	4	3	3	4	4	3	4	4	4
99	4	4	4	4	4	4	4	4	4
100	4	4	4	4	4	4	4	4	3
101	4	4	3	4	4	3	3	4	4
102	4	3	3	4	4	4	4	4	3
103	4	4	4	4	4	4	4	4	4
104	4	4	4	4	4	4	4	4	4
105	3	3	3	3	3	3	3	3	3
106	4	4	4	4	4	4	4	4	4
107	4	4	3	3	4	3	4	4	3
108	4	4	4	4	4	3	4	4	4
109	4	4	4	4	4	4	4	4	4
110	4	4	4	4	4	4	4	4	4
111	4	3	3	3	3	3	4	4	3
112	4	4	4	4	4	4	4	4	4
113	4	4	4	4	4	4	4	4	4
114	3	4	3	3	3	3	4	3	3
115	4	4	4	4	4	4	4	4	4
116	4	4	4	4	4	4	4	4	4
117	4	3	4	4	4	4	3	4	4
118	4	4	4	4	4	4	3	3	4
119	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Jumlah	457	449	439	427	444	442	449	439	436

No. Responden	Nilai Unsur Pelayanan								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Σ Nilai Per Unsur	457	449	439	427	444	442	449	439	436
NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur / Jumlah Responden	3,84	3,77	3,69	3,59	3,73	3,71	3,77	3,69	3,66
NRR tertimbang Per unsur = NRR Per Unsur 0. 1	0,427	0,419	0,41	0,399	0,4146	0,4127	0,419	0,41	0,4071
IKM Per unsur	96,01	94,33	92,23	89,71	93,277	92,857	94,33	92,23	91,597
IKM Unit Pelayanan	92,95051354								
Nilai IKM Maksim	96,01								
Nilai IKM Minimu	89,71								
Rata-rata IKM	92,95								
NRR IKM	3,72								
Jumlah responden 40 Orang	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM Per Unsur	3,84	3,77	3,69	3,59	3,73	3,71	3,77	3,69	3,66
Mutu Kinerja	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan				Prioritas 1					Prioritas 2
IKM Total	92,95 (Sangat Baik)								

- NRR IKM dan Grafik Indeks Kepuasan Masyarakat

IKM	: Jumlah NRR IKM tertimbang				
*)	: Jumlah NRR tertimbang				
**) :	: Jumlah nilai per unsur dibagi				
NRR Per Unsur	: Jumlah kuesioner yang terisi				
NRR tertimb per unsur	: NRR per unsur x 0.1				
IKM Unit Pelayanan	92,95				
Mutu Pelayanan	: A				
A (Sangat Baik)	: 88,31 - 100,00				
B (Baik)	: 76,61 - 88,30				
C (Kurang Baik)	: 65,00 - 76,60				
D (Tidak Baik)	: 25,00 - 64,99				

No.	Unsur Pelayanan	NRR IKM	IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	Persyaratan	3,84	96,01	A	SANGAT BAIK
2	Prosedur	3,77	94,33	A	SANGAT BAIK
3	Waktu Pelayanan	3,69	92,23	A	SANGAT BAIK
4	Biaya/Tarif	3,59	89,71	A	SANGAT BAIK
5	Kesesuaian Produk	3,73	93,28	A	SANGAT BAIK
6	Kesigapan Petugas	3,71	92,86	A	SANGAT BAIK
7	Perilaku/Kemampuan Petugas	3,77	94,33	A	SANGAT BAIK
8	Sarana dan Prasarana	3,69	92,23	A	SANGAT BAIK
9	Layanan Konsultasi dan Pengaduan	3,66	91,60	A	SANGAT BAIK



- Grafik Nilai Unsur Pelayanan

No.	Unsur Pelayanan SLO	NRR
1	U1	3,84
2	U2	3,77
3	U3	3,69
4	U4	3,59
5	U5	3,73
6	U6	3,71
7	U7	3,77
8	U8	3,69
9	U9	3,66
10	#REF!	#REF!

Unsur Pelayanan SLO	NRR
U9	3,66
U8	3,69
U7	3,77
U6	3,71
U5	3,73
U4	3,59
U3	3,69
U2	3,77
U1	3,84



Lampiran 3. Dokumentasi Hasil Tindak Lanjut SKM Periode Sebelumnya

 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN AMBON Jl. R. M. PUTIHENDU, WAELEA, RUMAH TIGA, KEC. TELUK AMBON, 97234 TELEPON: (0911) 351763, FAKS/ML: (0911) 351781 LAMAR www.kkp.go.id SURTEL psdp@ambon75p.go.id SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR B.2595/PSDKPSta.7/KP.440/09/2024 Menimbang : a. bahwa dalam rangka manajemen SDMA yaitu mengisi kekurangan jumlah personil pada Satuan Pengawasan SDKP di lingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon, dipandang perlu menugaskan pegawai pada Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Ternate, Maluku Utara. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Perutusan Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon. Dasar : 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I. Nomor 5/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; Memberi Tugas Kepada : Nama : Umar Bugis NIP : 19810912 201410 1 001 Golongan/ Pangkat : Pengatur./ II.c Jabatan : Asisten Pengawas Kelautan Terampil Unit Kerja : Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon Untuk : Terthitung mulai tanggal 27 September 2024, bertugas di Satwas Pengawasan SDKP Ternate, Maluku Utara. Dikirim ke web: ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BNSI, 30307	2 Demiikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Tertekstual untuk tidak memberikan esensi atau jeda yang dapat mengakibatkan KOD, garibasi dan lainnya kepanjangan. Ambon, 23 September 2024 Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon,  Ditandatangani Secara Elektronik Martin Yermias Luhulima Tembusan: Petugas Presensi
 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN AMBON Jl. R. M. PUTIHENDU, WAELEA, RUMAH TIGA, KEC. TELUK AMBON, 97234 TELEPON: (0911) 351763, FAKS/ML: (0911) 351781 LAMAR www.kkp.go.id SURTEL psdp@ambon75p.go.id SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR B.2595/PSDKPSta.7/KP.440/09/2024 Menimbang : a. bahwa dalam rangka manajemen SDMA yaitu mengisi kekurangan jumlah personil pada Satuan Pengawasan SDKP di lingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon, dipandang perlu menugaskan pegawai pada Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Halmahera Selatan. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Perutusan Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon. Dasar : 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I. Nomor 5/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Surat Tugas Nomor : B.1912/PSDKPSta.7/KP.440/09/2024 Hal : Melaksanakan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta tugas tambahan lainnya di Satuan Pengawasan SDKP Morotai, Wilur Tobelo, Memberi Tugas Kepada : Nama : Puji Winarna, S.H NP : 19871022 200701 1 003 Golongan/ Pangkat : Penata Muda - III/c Jabatan : Pengawas Kelautan Terampil Unit Kerja : Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon Untuk : Terthitung mulai tanggal 5 Agustus 2024, bertugas kembali di Satwas Pengawasan SDKP Halmahera Selatan. Dikirim ke web: ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BNSI, 30307	 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN AMBON Jl. R. M. PUTIHENDU, WAELEA, RUMAH TIGA, KEC. TELUK AMBON, 97234 TELEPON: (0911) 351763, FAKS/ML: (0911) 351781 LAMAR www.kkp.go.id SURTEL psdp@ambon75p.go.id SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR B.2595/PSDKPSta.7/KP.440/09/2024 Menimbang : a. bahwa dalam rangka manajemen SDMA yaitu mengisi kekurangan jumlah personil pada Satuan Pengawasan SDKP di lingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon, dipandang perlu menugaskan pegawai pada Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Ternate, Maluku Utara. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Perutusan Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon. Dasar : 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I. Nomor 5/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; Memberi Tugas Kepada : Nama : Umar Bugis NIP : 19810912 201410 1 001 Golongan/ Pangkat : Pengatur./ II.c Jabatan : Asisten Pengawas Kelautan Terampil Unit Kerja : Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon Untuk : Terthitung mulai tanggal 27 September 2024, bertugas di Satwas Pengawasan SDKP Ternate, Maluku Utara. Dikirim ke web: ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BNSI, 30307
3 Demiikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Tertekstual untuk tidak memberikan esensi atau jeda yang dapat mengakibatkan KOD, garibasi dan lainnya kepanjangan. Ambon, 2 Agustus 2024 Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon,  Ditandatangani Secara Elektronik Martin Yermias Luhulima Tembusan: Petugas Presensi	2 Demiikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Tertekstual untuk tidak memberikan esensi atau jeda yang dapat mengakibatkan KOD, garibasi dan lainnya kepanjangan. Ambon, 23 September 2024 Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon,  Ditandatangani Secara Elektronik Martin Yermias Luhulima Tembusan: Petugas Presensi